

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional dari aspek ekonomi dapat dimulai dari pedesaan, karena desa adalah lembaga pemerintah utama yang dapat menjangkau target sasaran yang akan di bangun (Rahmi & Subadi, 2022). Pembangunan desa telah dilakukan sejak awal kemerdekaan Indonesia namun strategi yang digunakan sering kali berubah. Perubahan strategi yang dilakukan memiliki tujuan untuk menemukan strategi mana yang paling efektif dalam jangka waktu tertentu. Permasalahan yang kerap terjadi di pedesaan adalah terkait dengan keterbelakangan, kesenjangan dan juga kemiskinan yang memang menghambat dalam pembangunan desa. Telah banyak program serta kegiatan guna mendukung pembangunan di desa tetapi masih banyak desa yang tertinggal hal ini bisa dilihat dari kesejahteraan masyarakatnya dan juga sarana dan prasarana yang terdapat di desa.

Masyarakat desa merupakan penerima manfaat sekaligus pelaksana pembangunan desa sehingga subjek dan objek dari pembangunan desa adalah masyarakat desa itu sendiri. Pembangunan desa harus berbasis pemberdayaan masyarakat desa (Sulaeman et al., 2020). Dengan diadakannya pemberdayaan masyarakat desa maka akan meningkatkan kemandirian masyarakat desa sehingga masyarakat desa dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terdapat di desa baik di bidang ekonomi, sosial bahkan politik.

Pembangunan desa bisa dengan maksimal dapat dilakukan dengan berbagai cara, hal pertama yang harus dilakukan adalah masyarakat desa mampu mengenali potensi desanya. Potensi desa bisa berupa fisik ataupun non fisik, potensi desa berupa fisik seperti tanah, kondisi lingkungan geografis, flora & fauna dan juga Sumber Daya Manusia (SDM). Potensi desa berupa non fisik diantaranya adalah kepercayaan, adat istiadat dan juga budaya masyarakat desa tersebut. Potensi- potensi tersebut dapat dijadikan sebagai modal awal atau modal dasar dalam pembangunan desa. Untuk mengenali potensi desa perlu adanya kerja sama antara pemerintah desa, tokoh masyarakat dan juga masyarakat desa itu sendiri tanpa terkecuali.

Dengan diadakannya pembangunan desa secara keseluruhan maka perekonomian desa pun akan ikut membaik. Pasalnya jika dibandingkan dengan perekonomian perkotaan tentu terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini pula yang melatarbelakangi banyaknya penduduk desa yang melakukan urbanisasi. Maka dari itu, perlu dilakukan pembangunan ekonomi desa karena masalah yang paling utama di desa adalah kemiskinan.

Pemerintah memiliki inovasi dalam membangun desa khususnya di bidang ekonomi sebagai strategi untuk mengatasi permasalahan ekonomi di desa, yakni inovasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hal ini selaras dengan isi dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 87 yang menjelaskan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha yang disesuaikan dengan potensi desa dan kebutuhannya masing-masing”. Pada awalnya pemerintah menganjurkan desa untuk membentuk BUMDes terdapat pada

bagian kelima pasal 213 UU No 32 Tahun 2004 namun mengalami perubahan menjadi UU No 6 Tahun 2014 (Sakti & Suparman, 2020).

Hal-hal yang berkaitan dengan BUMDes di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa atau yang di singkat BUMDes adalah entitas yang dibentuk oleh desa untuk menjalankan usahanya, mengelola asetnya, mengembangkan investasi dan produktivitas, serta memberikan pelayanan dan jenis usaha lainnya untuk kepentingan masyarakatnya.

PP No 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan dari didirikannya BUMDes adalah untuk melakukan kegiatan ekonomi dan juga pelayanan umum serta memperoleh keuntungan bagi pendapatan asli desa selain itu pendirian BUMDes dilakukan sebagai upaya untuk memanfaatkan aset desa untuk menciptakan nilai tambah aset desa dan juga mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Untuk mewujudkan tujuan dari didirikannya BUMDes ini diperlukan beberapa prinsip dalam pengelolaannya. Prinsip – prinsip tersebut diantaranya profesional, terbuka dan tanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan.

Posisi pengelola BUMDes terdapat di luar dari kepengurusan organisasi pemerintahan desa. Hal ini tercantum dalam Perda Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pasal 11 ayat 2 yang menjelaskan bahwa BUMDes berkedudukan di luar struktur organisasi pemerintahan desa. Maka dari itu,

pengurus BUMDes harus diluar dari pihak pemerintah desa melainkan dari masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengelola BUMDes tersebut.

Sesuai Perda Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2012 pasal 17 yang menjelaskan bahwa Pemerintah desa bertugas sebagai pengawas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga Lembaga Pemberdayaan Desa atau yang biasa di kenal dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Pemerintah Desa, BPD dan DPMD harus bekerja sama agar tujuan dari dibentuknya BUMDes dapat tercapai.

Saat ini hampir semua desa telah mendirikan BUMDes demi menunjang pertumbuhan ekonomi di desanya masing-masing. Begitupun di Kabupaten Cianjur dari 354 Desa yang ada 338 desa yang telah membentuk BUMDes. Berdasarkan observasi awal yng dilakukan penulis dengan teknik wawancara dengan Kasi (Kepala Seksi) Lembaga Bina Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Cianjur Unang Sunarya beliau menjelaskan bahwa:

“Di Cianjur itu terdapat 354 desa dan 338 desa telah mendirikan BUMDes. Namun, masih terdapat beberapa desa yang belum mendirikan BUMDes. Pastinya terdapat permasalahan masing-masing yang dirasakan oleh ke 16 desa yang belum mendirikan BUMDes ini tetapi permasalahan umum yang dialami oleh 16 desa yang belum membentuk BUMDes ini diantaranya kurangnya pemahaman mengenai BUMDes, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di desa tersebut dan juga pemerintah desa tidak memprioritaskan pembentukan BUMDes. Selain itu, terdapat kekhawatiran terhadap pengelolaan BUMDes dikarenakan SDM yang kurang memadai dan juga kurang percayanya pengurus desa terhadap BUMDes misalnya dalam pemilihan pengurus BUMDes”

Terdapat 338 desa di Kabupaten Cianjur namun yang telah membentuk BUMDes hanya 135 BUMDes yang masuk kategori BUMDes sehat. Terdapat

3 indikator untuk penilaian BUMDes sehat diantaranya adalah BUMDes yang sesuai dengan aturan, memiliki pengelolaan keuangan yang baik serta dapat berkontribusi kepada pendapatan asli desa sehingga perekonomian desa dapat terbantu. 338 BUMDes di Cianjur memang telah dibentuk namun terdapat 29 BUMDes yang tidak aktif. Menurut Kasi Lembaga Bina Ekonomi Desa DPMD Cianjur, Unang Sunarya hal ini dikarenakan pengurus BUMDes yang kurang mengenali potensi desanya sehingga tidak memanfaatkan potensi desa yang ada dengan maksimal.

Tabel 1.1
Data BUMDes di Kabupaten Cianjur tahun 2022

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Desa	354
2.	Desa yang sudah membentuk BUMDes	338
3.	Desa yang belum membentuk BUMDes	16
4.	Bumdes yang aktif	309
5.	Bumdes yang sehat	135

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Cianjur 2022

Kebanyakan BUMDes yang sudah berdiri di desa-desa Kabupaten Cianjur memilih jenis usaha perdagangan barang seperti sembako atau pupuk pertanian. Jika tidak BUMDes akan membuka usaha jasa *fotocopy* atau jasa penyewaan. Hal ini pula yang membuat banyak BUMDes yang akhirnya tidak aktif karena faktanya dilapangan BUMDes harus bersaing dengan usaha-usaha yang didirikan oleh masyarakat. Dan tujuan dari pembentukan BUMDes

sebagai upaya membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian justru malah bersaing dengan masyarakat.

Dalam mengatasi hal tersebut DPMD dan Pemerintah desa memiliki andil penting dalam membina dan mensosialisasikan terkait peraturan kebijakan serta tujuan dari pembentukan BUMDes. Komunikasi kebijakan yang berperan dalam hal ini. DPMD sebagai dinas fasilitator dan juga yang melakukan pembinaan terkait pemberdayaan desa perlu melakukan komunikasi kebijakan yang baik kepada pemerintah desa dan juga pengurus BUMDes.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa, ruang lingkup atau kewenangan dari DPMD salah satunya adalah terkait dengan badan usaha milik desa. Oleh karena itu DPMD memiliki tugas memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Sebagai bentuk fasilitasi terhadap pengembangan ekonomi desa DPMD cianjur melakukan sosialisasi untuk mengkomunikasikan perihal BUMDes. Menurut penjelasan Unang selaku Kasi Lembaga Bina Ekonomi Desa menuturkan:

“DPMD melakukan sosialisasi kepada pihak desa dengan mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang Kepala Desa dan pengurus BUMDes yang diadakan di kantor DPMD. Namun selain itu, sosialisasi ke lapangan dengan cara mengumpulkan pihak terkait di Kecamatan. Pihak dari DPMD pun menyelenggarakan pelatihan-pelatihan misalnya pelatihan manajerial BUMDes. Setelah itu, mengirimkan pengurus BUMDes ke program provinsi ketika diadakan suatu lomba atau kegiatan yang berkaitan dengan BUMDes. Tetapi disisi lain, pihak PMD pun selalu menghimbau agar BUMDes dengan mandiri mencari informasi di media sosial perihal info mengenai BUMDes”

Anggaran yang kurang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan sosialisasi. Sehingga pada tahun ini intensitas sosialisasi semakin berkurang baik sosialisasi yang diadakan di kantor DPMD maupun sosialisasi secara langsung terjun ke lapangan. Komunikasi merupakan salah satu kunci sukses dari suatu implementasi kebijakan. Bagaimana pemerintah mengkomunikasikan ke masyarakat dan bagaimana pemahaman masyarakat terkait kebijakan yang akan di implementasikan memiliki peran yang besar agar suatu program atau kebijakan itu berhasil.

Hal ini selaras dengan teori yang dijelaskan oleh George C. Edward III yang menyebutkan bahwa komunikasi menjadi salah satu dari empat variabel yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan (Pramono, 2020). *Pertama* komunikasi, pelaksana kebijakan harus mengetahui serta memahami apa yang harus dilakukan berkenaan dengan implementasi kebijakan tersebut sehingga dapat mengkomunikasikannya dengan baik kepada target sasaran kebijakan. Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dalam dimensi komunikasi masih terdapat permasalahan diantaranya kurangnya pemaknaan tentang BUMDes oleh pengurus BUMDes itu sendiri, kurang responsifnya pengurus BUMDes ketika sosialisasi diadakan dan masih ada beberapa desa yang belum membentuk BUMDes karena tidak tahu fungsi dan tujuan dari BUMDes.

Kedua, Sumber daya, selain kejelasan informasi sumber daya yakni implementor sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan karena sumber daya merupakan faktor pendukung yang berwujud sumber daya

manusia maupun sumber daya finansial. Menurut Unang Sunarya selaku Kasi Lembaga Bina Ekonomi Desa dalam dua tahun terakhir akibat dari pandemi Covid-19 DPMD kekurangan materi untuk menyelenggarakan sosialisasi program BUMDes selain itu tempat yang ada pun kurang memadai sehingga seringkali DPMD harus menyewa tempat untuk melakukan sosialisasi.

Ketiga disposisi, disposisi merupakan karakter atau watak yang dimiliki oleh implementor. Karakter tersebut dapat berwujud komitmen, sifat kejujuran dan yang lainnya. DPMD memiliki komitmen yang cukup dalam menyelenggarakan sosialisasi terkait program BUMDes hanya saja dua tahun terakhir sosialisasi dilakukan kurang intens karena keadaan covid-19 yang melanda sehingga dalam satu tahun sosialisasi dilakukan hanya satu kali saja.

Keempat Struktur birokrasi, struktur birokrasi adalah struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam proses implementasinya didukung dengan adanya SOP (*Standard Operational Procedures*). Di DPMD terdapat beberapa bidang dan bidang yang bertanggungjawab atas BUMDes adalah lembaga bina ekonomi desa dan pengelola BUMDes sebagai pelaksana kebijakan terkait dengan BUMDes.

Dalam kasus ini, dari permasalahan-permasalahan yang telah di jelaskan yaitu masih banyak masyarakat dan desa yang belum paham tentang BUMDes dan juga kurangnya pemahaman dari pengurus terkait dengan pengelolaan BUMDes dan juga masih adanya miskomunikasi dari pengelola BUMDes

terkait pemaknaan BUMDes itu sendiri. Selain daripada itu ketika pelaksanaan sosialisasi masih banyak pengurus BUMDes yang kurang responsif.

Namun komunikasi kebijakan perihal BUMDes bukan hanya antara DPMD dengan pemerintah desa dan pengurus BUMDes. Tetapi bagaimana pengurus BUMDes melakukan komunikasi dengan masyarakat terkait dengan fungsi dan tujuan dari di dirikannya BUMDes itu juga perlu diperhatikan. Karena pada hakikatnya BUMDes didirikan agar dapat memajukan desa dengan memanfaatkan potensi dari desa itu sendiri.

Banyaknya permasalahan yang telah dijelaskan diatas, bukan berarti tidak adanya BUMDes di Kabupaten Cianjur yang maju. Meskipun kebanyakan BUMDes membuka usaha sembako atau jasa yang bersifat mikro. Tetapi, terdapat pula beberapa BUMDes yang telah mengembangkan usaha ekonomi makro seperti mengelola desa wisata yang dilakukan oleh BUMDes Cimacan Marhamah yang membangun wisata alam berupa *camping ground*. Yang mana hal ini tentu akan membantu pembangunan desa secara makro.

Dalam menyukseskan berbagai program yang direncanakan oleh BUMDes, komunikasi kebijakan berperan sangat penting didalamnya. Agar masyarakat atau sasaran dari pelaksana program atau kebijakan paham sepenuhnya dalam hal ini adalah masyarakat Kabupaten Cianjur, maka diperlukan adanya komunikasi kebijakan yang efektif tentunya dengan memperhatikan indikator dalam komunikasi tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh George Edward III yaitu saluran, kejelasan dan konsistensi.

Model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III menyebutkan bahwa terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan (Pramono, 2020a). Dari ke empat faktor keberhasilan yang mempengaruhi implementasi kebijakan George C. Edward memasukan komunikasi di dalamnya. Yang menjadikan komunikasi sebagai salah satu instrumen penting dalam implementasi kebijakan. Agar implementasi kebijakan bisa berhasil salah satu kuncinya adalah komunikasi yang dilakukan harus efektif. Untuk menghasilkan komunikasi yang efektif tentunya harus memperhatikan tiga dimensi dari komunikasi yaitu *pertama* saluran atau dimensi, berdasarkan bentuknya saluran dalam komunikasi terbagi kedalam beberapa bagian diantaranya media cetak, media visual, media audio, dan media audio visual.

Kedua kejelasan, Kejelasan yang dimaksud disini adalah kejelasan informasi yang diberikan. Isi pesan dari apa yang ingin dikomunikasikan harus benar-benar jelas dan mudah dipahami oleh komunikan. *ketiga* konsistensi, pemberian informasi terkait isi kebijakan atau program tentu tidak bisa dilakukan sehari saja tetapi butuh konsistensi agar isi dari kebijakan atau program tersebut dapat dijalankan dengan baik. Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembangunan ekonomi desa melalui BUMDes di Kabupaten Cianjur. Fokus penelitian ini adalah komunikasi kebijakan dalam program BUMDes maka dari itu peneliti mengangkat judul “Komunikasi Kebijakan dalam Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Cianjur”.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Banyaknya masyarakat desa yang belum mengetahui dan paham tentang keberadaan BUM Desa
2. Adanya miskomunikasi terkait pemaknaan BUM Desa oleh pengurus BUM Desa itu sendiri
3. Kurangnya pemahaman pengurus BUM Desa dalam mengelola BUM Desa

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana komunikasi kebijakan yang dilakukan dalam pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Cianjur?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses komunikasi kebijakan yang dilakukan dalam pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Cianjur?
3. Apa solusi atas hambatan-hambatan yang ada dalam proses komunikasi kebijakan yang dilakukan dalam pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Cianjur?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui komunikasi kebijakan yang dilakukan dalam pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Cianjur
2. Untuk mengetahui faktor penghambat proses komunikasi kebijakan dalam pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Cianjur

3. Untuk mengetahui solusi atas hambatan-hambatan yang ada dalam proses komunikasi kebijakan yang dilakukan dalam pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Cianjur

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian bagi akademisi ataupun pemerintah daerah terkait dengan komunikasi kebijakan dan juga diharapkan mampu menambah dan memperkaya pengetahuan yang ada serta bisa dijadikan sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan komunikasi kebijakan dalam pembangunan ekonomi desa.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang sangat membantu meningkatkan kapasitas serta pengalaman peneliti terutama berkaitan dengan kondisi perekonomian desa khususnya di Kabupaten Cianjur.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan gambaran pemerintah daerah dalam menentukan arah strategi untuk perbaikan komunikasi kebijakan dalam pembangunan ekonomi desa.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan dan juga dapat memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat terkait dengan pembentukan BUMDes sebagai upaya pembangunan ekonomi desa.

1.6. Kerangka Berpikir

Permasalahan dalam pembangunan ekonomi desa memang bisa dikatakan rumit maka dari itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengatasi berbagai permasalahan tersebut. dalam hal ini komunikasi kebijakan yang dilakukan dalam pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Cianjur, dengan dilakukannya penelitian maka akan didapatkan suatu hasil yang konkrit. Dengan adanya kebijakan program BUMDes sebagai upaya pembangunan ekonomi desa maka masyarakat perlu paham akan program tersebut.

Melalui komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dapat mengetahui tujuan serta manfaat dari kebijakan tersebut. untuk mengetahui bagaimana komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dengan masyarakat khususnya pengelola BUMDes terkait dengan program BUMDes maka peneliti menggunakan teori implementasi menurut George C. Edward III dalam Joko Pramono (2020) yang menjelaskan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan juga struktur birokrasi.

Fokus penelitian ini adalah pada aspek komunikasinya, karena komunikasi merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan. Dalam komunikasi pun terdapat 3 indikator untuk melihat

keberhasilannya, 3 indikator tersebut diantaranya adalah saluran, kejelasan dan juga konsistensi. Apabila 3 indikator ini dapat dijalankan dengan baik maka bukan tidak mungkin komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengkomunikasikan kebijakan BUMDes kepada masyarakat sebagai upaya pembangunan ekonomi desa akan berhasil

Gambar 1. 1
Kerangka Berpikir

